

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis kemunculan partai politik seperti yang ada saat ini tidak seperti dulu. Di Perancis dan Inggris, kegiatan politik bersifat elitis dan aristokratis. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menikmatinya. Mereka yang bisa bergabung adalah para kalangan bangsawan, dan orang-orang kaya, serta segelintir orang yang dianggap memiliki kekuasaan seperti para pendeta.

Dalam berbagai kepustakaan barat, seperti dikutip oleh Prof. Miriam Budiardjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, dijelaskan bahwa partai politik pertama-tama lahir di Eropa Barat. Gagasan munculnya partai politik dari sebuah pandangan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikutsertakan dalam proses politik. Karena itu perlu sebuah wadah yang dapat menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak yang lain.

Secara lambat namun pasti, pada perkembangan selanjutnya, proses politik yang berada dalam parlemen dan hanya dimiliki oleh segelintir golongan tertentu saja mulai meleleh, dan terjadi pengerasan. Masyarakat mulai dilibatkan. Berpuluh-puluh tahun proses ini terjadi. Sampai pada perkembangan selanjutnya, partisipasi politik dengan mendirikan partai politik menjadi subur, dan berkembang pesat.

Dalam konteks Indonesia, partai-partai politik mulai tumbuh pada saat masa kolonial. Kesadaran akan pentingnya memperjuangkan kemerdekaan pada ranah politik menjadikan anak bangsa pada saat ini mulai mengubah strategi perjuangan ke ranah

organisasi modern seperti partai politik. Namun perjuangan pada ranah fisik, seperti mempertahankan sebuah daerah dari kekejaman dan kebrutalan penjajah masih tetap eksis.

Partai politik juga merupakan salah satu wahana guna menyatakan dukungan atau tuntutan dalam proses politik. Semua dukungan itu adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat yang diwujudkan melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara demokrasi, jujur, adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan meluasnya anggapan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintah. Gagasan mengenai partisipasi politik rakyat melalui partai politik di negara-negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, memiliki dasar budaya politik dan ideologi yang kuat bahwa rakyat ikut serta menentukan seseorang yang akan menjadi pemimpin mereka, dan untuk menentukan isi kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pada prinsipnya Pemilu dalam ranah demokrasi lebih bermakna sebagai : *pertama*, kegiatan partisipatorik politik dalam menuju kesempurnaan oleh berbagai pihak. *Kedua*, sistem perwakilan bukan partisipasi langsung dalam bahasa politik kepanjangan tangan dimana terjadi perwakilan penentuan akhir dalam memilih elit yang berhak duduk mewakili masyarakat. Akibatnya muncul perlombaan *make up* dalam mendapat simpati sebagai wujud representasi masyarakat luas. *Ketiga*,

sirkulasi pada elit politik yang berujung pada perbaikan *performance* pelaksana eksekutifnya¹.

Dari berbagai banyak ukuran untuk mengetahui keberhasilan demokrasi secara tepat salah satunya bisa dilihat dari bagaimana partai politik menjalankan fungsinya untuk memasukkan agenda-agenda kebijakan publik yang bermanfaat tidak saja bagi konstituen pemilihnya, melainkan juga bermanfaat bagi seluruh komponen bangsa yang ada. Ukuran demokratis tidaknya, misalnya, bisa dilihat dalam kerangka apakah aspirasi konstituen sebagaimana yang dicerminkan dalam janji-janji partai politik terwujud dalam implementasinya. Di negara-negara yang maju secara ekonomi maupun politik ditandai dengan perhatian serius dari partai untuk mewujudkan janji-janji politiknya pasca partai tersebut memenangkan sebuah pemilu (*election*).

Komunikasi politik sendiri merupakan salah satu fungsi yang dijalankan dari partai politik dengan segala struktur yang tersedia, yaitu mengadakan komunikasi informasi, isu, dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik².

Berkaitan dengan komunikasi politik ini yang penting untuk dicatat adalah bagaimana partai politik dapat mengelola komunikasi politik di internal partai politik mereka sendiri, baru kemudian berbicara tentang komunikasi politik dengan pihak luar. Hasil dari sebuah komunikasi politik ini tentunya adalah rendahnya tingkat konflik yang ada di dalam entitas yang dikomunikasikan itu. Sementara yang terjadi saat ini adalah bahwa komunikasi politik yang mengarah pada rekonsiliasi

¹ Tataq Chidmat,SH, *Kritik Terhadap Pemilihan Langsung*, Pustaka Widyatama, Yogyakarta, 2004.

² Koirudin. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Pelajar , Yogyakarta, 2004.,. hlm.

konflik. Dan hal itu belum tercapai bahkan di tingkat internal partai politik yang ada.

Babak baru sejarah perjalanan bangsa Indonesia pun dimulai. Pasca tumbanganya Orde Baru dan berganti suatu sistem bertajuk reformasi. Kebebasan berekspresi dan beraspirasi dalam panji-panji demokrasi yang telah lama ditunggu, akhirnya menemukan masanya. Dalam Orde Baru Pemerintah dalam menancapkan kekuasaannya menempuh 3 hal, yaitu fusi partai politik, penguatan Golkar dan penyeragaman asas bagi organisasi politik. Ketiga langkah tersebut terbukti sangat efektif dalam membawa rezim ini berkuasa selama 32 tahun. Sehingga ketika Soeharto lengser, berubah pula langgam politik nasional³.

Pasca lengsernya Soeharto, demokrasi bertajuk reformasi pun dimulai. Banyaknya partai politik yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu. Setelah UU No. 2/1999 disahkan tercatat 141 partai politik yang mendaftarkan diri di Departemen Kehakiman dan HAM. Meski kebebasan partai untuk berpolitik sudah jauh berkembang, bahkan dijamin dalam aturan yang demokratis akan tetapi tantangan yang dihadapi bangsa ini kedepan semakin berat jika tidak dapat menyikapinya dengan baik.

Salah satu partai politik yang muncul pasca orde baru tumbang adalah Partai Amanat Nasional (PAN). PAN sejak dideklarasikan 23 Agustus 1998 senantiasa mengundang dukungan pemilih lintas agama, suku, daerah, dan kaum pekerja dengan menggunakan simbol-simbol kebangsaan, tetapi tetap berasaskan religiusitas. Partai berlambang Matahari dengan 32 sinar yang menyala terang memiliki banyak arti. 32 sinar yang berarti sinar yang menerangi negeri ini yang

³Ibid, hlm. 50

telah selama 32 tahun hidup dalam belenggu ketidakadilan dan ketidakpastian karena selalu diselimuti oleh praktek-praktek KKN yang terus merajalela. Hal ini terjadi karena PAN didirikan atas dasar tuntutan gerakan reformasi yang menghendaki pembaruan di segala bidang. Pembaruan diarahkan pada tujuan terbangunnya Indonesia Baru yang terdiri dari masyarakat terbuka berupa masyarakat madani. Adalah mereka yang selalu berjuang untuk memperbaiki diri sendiri melalui pemikiran kreatif warganya dalam menghadapi berbagai tuntutan yang selalu meningkat dan berubah.

PAN dalam kiprahnya senantiasa berupaya mengedepankan reformasi dan bukan revolusi, yang pada prosesnya menjungkirbalikkan keadaan. Dalam bekerja, PAN selalu berpikir melakukan perubahan-perubahan secara bertahap. Oleh karena itu, PAN dalam perjuangan selalu berkolaborasi dengan berbagai kekuatan politik untuk mencapai tujuan-tujuan dimaksud, dengan melihat realita politik di lapangan. Dalam politik praktis, agenda pilkada (pemilihan kepala daerah) misalnya, PAN lebih mengedepankan prosesnya yang harus berjalan secara demokratis dan *output*-nya adalah pemimpin daerah yang memiliki visi dan misi sama menuju pencapaian masyarakat madani tadi.

Kota Yogyakarta merupakan basis massa terbesar Muhammadiyah yang sebagian besar anggotanya adalah orang-orang PAN. Dinamika partai politik di Yogyakarta sendiri sangat kompleks dengan tumbuhnya partai baru yang akan ikut mewarnai kompetisi dalam pemilu 2009. Menuju Pemilu 2009 dalam tubuh Muhammadiyah terbentuk partai baru yaitu Partai Matahari Bangsa, para pengurus dan massanya adalah para angkatan muda dan orang-orang dari Muhammadiyah juga, sehingga dalam menghadapi pemilu 2009 ini PAN hendaknya mampu

melakukan komunikasi politik untuk memperjuangkan kepentingan konstituennya dan masyarakat. Selain untuk memperjuangkan kepentingan para konstituennya, PAN dalam menjalankan fungsinya untuk menjaring konstituen melakukan *agenda setting* melalui kampanye sebagai bagian dari komunikasi politik. Kampanye dapat diartikan sebagai upaya persuasif mengajak orang lain yang belum sefaham atau belum yakin pada ide-ide yang kita tawarkan, agar mereka bersedia bergabung dan mendukungnya. Karena itu ide-ide yang kita lontarkan haruslah yang terbaik yang bisa dirumuskan, serta dapat disampaikan sesuai dengan alam pikiran orang lain yang kita harapkan dukungannya.

Berdasarkan pemahaman diatas, adalah kesalahan besar bila selama ini kampanye dilakukan hanya di depan para warganya sendiri, serta melarang orang lain (bukan anggota partai yang berkampanye) untuk masuk ke arena kampanye. Untuk apa meyakinkan orang yang memang sudah pasti untuk memilih partai yang kita pimpin? Kita butuh meyakinkan orang lain. Hingga kampanye yang benar adalah berbicara dihadapan orang yang belum tentu akan memilih partai kita⁴.

Keterlibtan mahasiswa dibidang politik merupakan sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Dalam kaitan untuk merealisasi tercapainya kehidupan politik yang semakin demokratis tentu bukan hanya menjadi tugas partai politik, meskipun partai politik harus memainkan peran yang penting, melainkan juga menjadi tugas mulia seluruh komponen masyarakat terutama mereka para generasi muda yang terdidik seperi mahasiswa.

⁴ Riswandha Imawan , *Kampanye Tanpa Hura-hura*, Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia, no.4/oktober 1999. hlm. 44

Ada dua dimensi yang harus diperhatikan dalam keterlibatan mahasiswa dibidang politik⁵ :

Pertama, posisi mahasiswa sebagai pemimpin masa depan atau kader bangsa. Dalam posisi ini, mahasiswa tidaklah cukup diperlakukan sebagai calon politisi. Yang lebih penting adalah menempatkan mereka sebagai calon negarawan.

Kedua, posisi mahasiswa sebagai pemilih yang tak mungkin diabaikan salah satu partai politik.

Perkembangan politik di Indonesia tidak dapat terlepas dari peran serta mahasiswa. Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa merupakan motor penggerak perubahan demokrasi di Indonesia. Adanya gerakan Budi Utomo sampai pada gerakan Mei 1998 yang semuanya membawa perubahan bagi kehidupan perpolitikan di Indonesia.

Pendidikan politik merupakan salah satu metode dalam usaha sosialisasi politik. Almond mengartikan sosialisasi politik adalah proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk dan juga merupakan suatu sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik pada generasi berikutnya⁶.

Begitu juga perkembangan studi ilmu politik terutama di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, studi mengenai Ilmu Politik semakin berkembang dengan sistem pendidikan yang dikembangkan dan diberikan oleh para pengajar. Mulai pemahaman tentang politik sampai pada pemahaman komunikasi politik

⁵ Jayadi, *Kampanye dan Politisasi Pelajar*, Republika Mei 2003, hal.2

⁶ Haryanto, *Sistem Politik Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal.39.

terhadap suatu partai politik. Sehingga dengan pengetahuan yang didapat oleh mahasiswa, nantinya mereka mampu untuk memahami bagaimana keadaan politik pada saat ini dan dapat juga memprediksi apa saja yang akan terjadi pada perkembangan politik berikutnya.

Dalam kaitannya dengan ini, mahasiswa UMY merupakan warga muhammadiyah yang lekat dengan sosok Amien Rais dan Partai Amanat Nasional. Salah seorang tokoh yang merupakan pendiri PAN adalah Amien Rais. Berbicara mengenai PAN tidak dapat terlepas dari sosok Amien Rais, yang selalu mengedepankan reformasi. Begitu juga berbicara tentang PAN tidak dapat terlepas dari Muhammadiyah.

Daya tarik seorang tokoh nasional dalam pemilu yang proposional sangat berpengaruh pada perolehan suara. Komunikasi politik yang dijalankan PAN sedikit banyak dipengaruhi oleh Amien Rais. Contoh kasus yang baru-baru ini terjadi adalah pada waktu Amien Rais menyikapi kasus DKP yang pada waktu itu sempat bersitegang dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat itu PAN nyaris menarik kader-kadernya dari kabinet. Tetapi setelah terjadi pertemuan antara Amien Rais dan SBY selang dua hari PAN mengadakan Rakernas dan terjadi kesepakatan untuk mengurungkan niat menarik kader-kader PAN dari kabinet (kompas). Dari contoh kasus tersebut dapat dilihat bahwa Amien Rais sangat berpengaruh dalam komunikasi politik didalam tubuh PAN.

Figur Amien Rais yang mantan ketua umum Muhammadiyah cenderung sangat dominan dalam membangun partisipasi politik. Hal ini tercermin dengan simbolisasi Amien sebagai “Bapak Reformasi” bagi perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Harus diakui bahwa eksistensi Amien di perpolitikan nasional

merupakan investasi politik yang tak ternilai bagi PAN. Apalagi figuritas Amien ternyata juga menjadi simbol politik pasca Orde Baru, di samping Gus Dur, Megawati, dan Sultan Hamengkubuwono X.

Sejak berdirinya PAN, Amien Rais menjadi simbol dan identitas utamanya, yang sekaligus memberi harapan baru bagi mereka yang rindu akan perubahan dan perbaikan. Barangkali tak berlebihan kalau dikatakan bahwa tanpa sosok dan peran Amien Rais, PAN tak akan langsung melejit masuk lima besar pada Pemilu 1999. Soalnya, ia dikenal sebagai intelektual yang kritis, bersih, dan menjadi salah satu lokomotif perubahan di negeri ini, utamanya dalam proses-proses pergantian kepemimpinan di Indonesia dari rezim otoriter ke era demokrasi⁷.

Muktamar II Partai Amanat Nasional yang berlangsung di Semarang (7-10 April 2005) berhasil memilih Soetrisno Bachir sebagai pemimpin barunya menggantikan Prof Dr H Amien Rais. Hal ni menunjukkan regenerasi kepemimpinan di PAN berjalan begitu cepat. Tak bisa dimungkiri kalau hal itu terjadi karena faktor mantan kandidat presiden (Amie Rais), yang sudah tak ingin dipilih kembali, menginginkan sirkulasi elite dalam partainya berlangsung seperti yang diharapkannya. Jago yang dipersiapkan atau dielusny, yakni Soetrisno Bachir, seorang saudagar asal Pekalongan, ternyata memang berhasil menang⁸.

Dalam konteks ini, posisi identitas Amien Rais tak hanya sebagai intelektual kampus, tetapi juga sebagai salah satu patron di Muhammadiyah-sebuah organisasi massa Islam terbesar kedua setelah Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia, ditambah dengan pendukungnya dari kalangan yang terdidik di perkotaan. Semua ini, diakui

⁷ Laode Ida, *Prospek PAN Pasca Amien Rais*, Kompas 11 April 2005

⁸ Ibid.

atau tidak, sebagai kekuatan yang membesarkan PAN selama ini. Dengan demikian, ketika Amien Rais tak lagi memimpin PAN, maka keraguan terhadap figur baru yang memimpin PAN tak bisa dihindarkan karena niscaya eksistensi figur Soetrisno Bachir, kendati ia didukung kuat Amien Rais, tak akan mungkin bisa menggantikan posisi dan citra Amien Rais. Soalnya, pengganti Amien Rais itu, sekali lagi, hanyalah seorang pengusaha yang bukan hanya tak dikenal luas oleh publik bangsa ini, melainkan juga di intern PAN sendiri masih banyak yang sangat asing dengan sosoknya.

Berdasarkan pemahaman diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan selanjutnya ditulis dalam bentuk usulan skripsi yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Terhadap Partai Amanat Nasional Pasca Amien Rais (STUDI DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

“Bagaimana persepsi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap Partai Amanat Nasional pasca Amien Rais?”

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori adalah teori-teori yang digunakan di dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

Menurut Masri Singarimbuan, Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan reposisi untuk menerangkan suatu fenomena dengan cara merumuskan

hubungan antar konsep⁹. Menurut definisi ini teori mengandung tiga hal. *Pertama*, teori adalah serangkaian proposisi antar konsep-konsep yang saling berhubungan. *Kedua*, teori menerangkan secara sistematis suatu fenomena sosial dengan cara menentukan konsep mana yang berhubungan dengan konsep lainnya dan bagaimana bentuk hubungannya.

Menurut Koentjaraningrat, teori adalah merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang diteliti dan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat¹⁰. Dengan demikian pada dasarnya teori itu merupakan sarana pokok yang menyatukan hubungan sistematis antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti.

C. 1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Beberapa pengertian atau definisi dari partai politik :

- 1) Partai politik menurut *Carl J. Friedrich*, partai politik adalah sekelompok manusia yang berorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini dan memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil maupun materil¹¹.
- 2) Menurut *Sigmurid Newman* dalam bukunya *modern political parties* mengemukakan definisi partai politik adalah, organisasi dari aktivitas-aktivitas

⁹ Masri Singarimbuan dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Jakarta, 1989, hlm. 19

¹⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1991, hlm.19

¹¹ Meriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 1992, hal.161. mengutip pendapat Carl J. Friedrich.

politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda¹².

3) Menurut *R.H. Soltau*, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih yang bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka¹³.

4) *Lapalombara* dan *Weiner*, partai politik adalah organisasi yang mempunyai kegiatan berkesanumbungan. Artinya, masa hidupnya tak bergantung pada masa jabatan atau masa hidup para pemimpinnya¹⁴.

5) Partai politik menurut pasal 1 UU No. 02/2008 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari beberapa pengertian partai politik diatas maka dapat disimpulkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai otoritas nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini berusaha memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

¹² Ibid, hal.162, Mengutip Pendapat Sigmund Newman

¹³ Ibid, hal.162, Mengutip Pendapat R.H. Soltau

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 114

Partai politik merupakan salah satu institusi inti dari pelaksanaan demokrasi modern. Mengingat peran dan fungsi partai politik yang begitu penting, disini penelitian difokuskan pada Partai Amanat Nasional (PAN).

b. Asal Mula dan Perkembangan Partai Politik

Secara historis gagasan membentuk partai politik dengan segala perangkat fungsionalnya telah dibicarakan di Eropa Barat sejak lama. Partai politik lahir karena semakin meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan kekuatan penuh yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik¹⁵.

Sebenarnya ide dasar untuk membentuk partai politik sudah menunjukkan indikasinya pada era *Renaissance* dan *Aufklarung*. Manakala kekuasaan para raja dikecam dan mulai dibatasi, sebenarnya keinginan untuk membentuk partai politik sudah mulai bermunculan. Terlebih-lebih hak pilih bagi rakyat sudah diberikan secara luas.

Setelah wacana perluasan hak-hak politik bagi rakyat semakin meningkat dengan pesat itulah, partai politik seakan telah lahir dengan sendirinya secara spontan. Apalagi, keterlibatan rakyat dalam proses politik yang ada waktu itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang urgen dan mendesak. Maka sebagai wujud interaksi antara pemerintah dan rakyat, diperlukan kendaraan politik yang diasumsikan mampu menjaga simbiosis antara keduanya. Dan kendaraan politik tersebut pada akhirnya bernama partai politik¹⁶.

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1980, hal. 159

¹⁶ Koirudin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 25

Ada tiga teori tentang asal mula partai politik :

1) Teori Kelembagaan

- Ada hubungan antara munculnya parlemen dengan munculnya partai politik.
- Partai politik dibentuk oleh legislatif dan eksekutif, karena ada kebutuhan anggota parlemen (yang diangkat) untuk mengadakan kontak dengan masyarakat dengan membina dukungan dari masyarakat.
- Setelah itu muncul partai politik lain yang dibentuk masyarakat yang sadar bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak akan mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. (diluar parlemen), contoh : Partai Buruh di Inggris dan Australia, dan Partai Hijau di Jerman.

2) Teori Situasi Historis

- Munculnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dari perubahan masyarakat secara luas.
- Situasi perubahan yang disebabkan antara lain, perluasan pendidikan, partisipasi media, perbaikan fasilitas kesehatan, dan sebagainya menimbulkan tiga macam krisis, yaitu legitimasi, integrasi, dan partisipasi.
- Untuk mengatasi tiga macam krisis tersebut parpol dibentuk (untuk mengendalikan pemerintah, mengakomodasi kepentingan berbagai

kelompok dan terbuka bagi semua kelompok dan sebagai saluran partisipasi.

3) Teori Pembangunan/Modernisasi Sosial Ekonomi

- Partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi.
- Perubahan dalam berbagai bidang, akan melahirkan suatu kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang tersebut.

c. Fungsi Partai Politik

Sejak tumbuh kembangnya revolusi partisipasi rakyat partai politik dijadikan sebagai bagian terpenting dari sistem politik modern. Bahkan Roy C. Macridis mengatakan, tidak ada sistem politik yang berlangsung tanpa adanya partai politik. Ramlan Surbakti menguraikan fungsi partai politik sebagai berikut¹⁷ :

1) Fungsi Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legislatif, agar kepentingan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuatan kebijakan publik.

¹⁷ Ibid. hlm.86

2) Fungsi Agregasi Kepentingan

Agregasi kepentingan merupakan cara bagaimana tuntutan-tuntutan yang dilancarkan oleh kelompok-kelompok yang berbeda, digabungkan menjadi alternatif-alternatif pembuatan kebijakan publik. Agregasi kepentingan dijalankan dalam sistem politik yang tidak memperbolehkan persaingan partai secara terbuka, fungsi organisasi itu terjadi di tingkat atas, mampu dalam birokrasi dan berbagai jabatan militer sesuai dengan kebutuhan dari rakyat dan konsumen.

3) Fungsi Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang dianut oleh suatu Negara. Pembentukan sikap-sikap politik atau dengan kata lain untuk membentuk suatu sikap dan keyakinan politik dibutuhkan waktu yang panjang melalui proses berlangsung tanpa henti.

4) Fungsi Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik merupakan suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik mempunyai sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen berbeda.

5) Fungsi Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang dijalankan partai politik dengan segala struktur yang tersedia, yakni mengadakan komunikasi

informasi, isu dan gagasan politik. Media-media massa banyak berperan sebagai alat komunikasi politik dan membentuk kebudayaan politik.

Dari berbagai macam uraian mengenai fungsi-fungsi politik diatas, fungsi partai politik yang paling umum dikemukakan adalah : representasi (perwakilan), konversi dan agregasi, integrasi (partisipasi, sosialisasi, mobilisasi), persuasi, represi, rekrutmen (pengangkatan tenaga-tenaga baru), dan pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijaksanaan, serta kontrol terhadap pemerintah¹⁸.

d. Sistem Kepartaian

Dalam suatu studi komparatif mengenai berbagai macam sistem-sistem partai mengungkapkan persamaan tertentu yang menonjol, dengan demikian dapat melukiskan jenis-jenis sistem yang tampak mempunyai pengaruh yang besar pada struktur dan cara kerja rezim-rezim politik. Klasifikasi pada umumnya diambil pada hubungan ini yang membedakan sistem partai yang pluralistis dari sistem partai tunggal. Tetapi pikiran dasar dari sebuah partai dominan adalah merupakan suatu jembatan dari suatu sistem partai pluralistis dan sistem partai tunggal.

Dalam suatu sistem partai pluralistis, setidaknya terdapat dua partai didalamnya, tanpa ada yang menghalangi superioritas atas yang lainnya. Bila ada yang sebelumnya sudah lebih berkuasa, maka ia langsung menjadi “sistem partai yang dominan”. Dalam sistem partai pluralistis, suatu perbedaan dasar terlihat antara sistem dua partai dan sistem multi partai, yang didasarkan pada perbedaan cara kerja dalam institusi yang demokratis.

¹⁸ Ichlasul Amal, *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1988, hlm.27

Partai politik menurut Maurice Duverger dalam buku *Partai Politik* suatu tinjauan umum oleh Drs. Haryanto dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu¹⁹ :

1) Sistem Partai Tunggal (*one party system*)

Sistem satu partai atau one party adalah sistem yang menunjukkan bahwa pada suatu negara hanya terdapat satu partai politik yang dominan, partai politik tersebut memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di negara yang bersangkutan.

Disuatu negara yang menganut sistem satu partai, mungkin di negara tersebut memang hanya ada satu partai, atau mungkin ada beberapa partai politik tetapi tidak mempunyai peranan penting dalam kehidupan politik, dalam arti partai politik tersebut merupakan partai-partai politik kecil, walaupun partai politik itu tidak ada, kehidupan politik di negara tersebut tidak akan terpengaruh. Sehingga di negara-negara yang menganut sistem satu partai pada umumnya tidak ada persaingan antar kekuatan politik, karena hanya ada satu partai politik yang dominan.

2) Sistem Dua Partai

Sistem dua partai, bahwa disuatu negara hanya terdapat dua partai politik yang dominan. Walaupun di negara tersebut hanya terdapat dua partai yang dominan dalam kehidupan politik negara tersebut, tidak menutup kemungkinan masih terdapat partai-partai politik kecil yang kurang atau tidak memainkan peranan penting dalam negara tersebut.

¹⁹ Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984

Sistem dua partai, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Maurice Duverger, mempunyai kecenderungan diperkuat dengan dipergunakannya sistem pemilihan yang berdasarkan pada sistem distrik. Sistem pemilihan yang berdasarkan sistem distrik mengisyaratkan pada setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu orang wakil saja, oleh karena itu sistem pemilihan ini tidak mendorong tumbuhnya partai politik baru, sehingga dengan demikian akan memperkuat sistem dua partai yang sudah ada.

3) Sistem Multi Partai

Sistem multi partai atau banyak partai merupakan sistem yang menunjukkan bahwa disuatu negara terdapat partai politik yang jumlahnya lebih dari dua. Partai-partai politik tersebut memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik negara yang bersangkutan.

Pada umumnya negara yang menganut sistem banyak partai adalah negara yang masyarakatnya bersifat majemuk. Kemajemukannya dapat dilihat dari bermacam-macam perbedaan sosial, seperti ras, suku, agama, atau status. Kemajemukan masyarakat tersebut akan mendorong golongan-golongan dalam masyarakat untuk menyalurkan loyalitas mereka ke organisasi yang sesuai dengan primordialnya daripada bergabung dengan kelompok-kelompok lain yang berbeda orientasinya.

e. Tipologi Partai Politik

Maksud dari tipologi adalah untuk menyarankan garis-garis besar dan petunjuk, untuk memberikan suatu aturan bilamana terdapat kebingungan yang mendalam, dan untuk mempermudah bilamana muncul kekaburan yang luar biasa²⁰.

Banyak terdapat definisi dan tipologi tentang partai politik dan sistem kepartaian. Di antaranya dapat kita cantumkan sebagai berikut : otoriter dan demokrasi, integratif dan representatif (perwakilan), ideologis dan pragmatis, agamis (religius) dan sekuler, demokratis dan revolusioner, massa dan elit, demokratis dan oligarki.

Tipologi partai politik menurut Ramlan Surbakti, adalah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan²¹. Klasifikasi ini cenderung ideal karena dalam kenyataan tidak sepenuhnya demikian. Tetapi untuk tujuan memudahkan pemahaman, tipologi ini sangat berguna.

Beberapa tipologi menurut kriteria-kriteria tersebut :

1) Asas dan Orientasi

Berdasarkan asas dan orientasinya partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe, ketiga tipe itu adalah meliputi partai politik pragmatis, partai politik doktriner, dan partai politik kepentingan.

²⁰ Ichlasul Amal, *Op.cit* hlm. 34.

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hlm. 121

a) Partai politik pragmatis

Yang dimaksud partai politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada satu doktrin dan ideologi tertentu. Artinya perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan dan penampilan partai politik tersebut. Penampilan partai politik pragmatis cenderung merupakan cerminan dari program-program yang disusun oleh pemimpin utamanya dan gaya kepemimpinan sang pemimpin. Partai ini biasanya terorganisasikan secara agak longgar. Hal ini tidak berarti partai politik pragmatis tidak memiliki ideologi sebagai identitasnya.

b) Partai politik doktriner

Partai politik doktriner adalah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkrit sebagai penjabaran ideologi-ideologi yang dimaksud adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara jelas dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh partai. Pengertian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara jelas dan partai ini terorganisasikan secara ketat.

c) Partai politik kepentingan

Partai politik kepentingan adalah suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, partai ini sering ditemui dalam sistem dua partai bersaing, namun tidak mampu mengakomodasikan sejumlah kepentingan dalam masyarakat.

2) Komposisi dan Fungsi Anggota

Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a) Partai massa

Partai massa adalah partai politik yang mengendalikan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dengan mudah dimenangkan dan nasional dapat dipelihara, tetapi juga masyarakatnya dapat dimobilisasi untuk mendukung dan melaksanakan tujuan-tujuan tertentu. Partai ini seringkali merupakan gabungan berbagai aliran politik yang sepakat untuk berada dalam lindungan partai guna memperjuangkan dan melaksanakan program-program yang pada umumnya bersifat sangat umum.

b) Partai kader

Partai kader adalah suatu partai guna mengandalkan kualitas anggota, kekuatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi anggota dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan insentif, serta struktur organisasi partai ini sangat hirarkis sehingga jalur perintah dan tanggung jawab sangat jelas. Karena sifatnya demikian maka partai kader disebut juga partai yang sangat elitis.

c) Basis Sosial dan Tujuan

Partai politik berdasarkan basis sosial dapat dibagi menjadi empat tipe :

- Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat. Seperti kelas atas, menengah dan bawah.
- Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok kalangan tertentu. Seperti petani, buruh dan pengusaha.
- Partai politik yang anggotanya pemeluk agama tertentu.
- Partai politik bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.

Berdasarkan tujuan partai politik dibagi menjadi tiga :

- Partai perwakilan kelompok, artinya partai yang menghimpun kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.
- Partai pembinaan bangsa, partai politik bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan yang sempit.
- Partai mobilisasi, artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pemimpin partai, sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai ini cenderung monopolistis karena hanya satu partai dalam masyarakat.

C. 2. Persepsi

Persepsi merupakan proses pengorganisasian terhadap stimulus yang diterima oleh *organisme* atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang integral dalam diri individu²².

Berbeda dengan Bimo Walgito, Saparinah Sadli mendeskripsikan persepsi dengan lebih jelas, yakni “ Suatu proses yang aktif dimana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenalinya, tetapi ia juga sebagai keseluruhan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasinya dengan sikap-sikap yang relevan terhadap stimulasi tersebut.”²³

Sedangkan Miftah Thoha memaknai persepsi sebagai “Bentuknya dalam proses kognitif, yang di alami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasinya.”²⁴

Persepsi memiliki tiga dimensi yaitu : *pertama*, persepsi itu dilandasi oleh pengetahuan, atau apa yang kita ketahui (atau kita anggap tahu) tentang sesuatu itu, baik itu wujud lahiriah, perilaku, masa lalu, perasaan, motif, dan sebagainya. *Kedua*, pengharapan: gagasan kita tentang orang itu menjadi apa dan mau melakukan apa dipadukan dengan gagasan kita tentang seharusnya dia menjadi apa dan melakukan apa. *Ketiga*, evaluasi: kesimpulan kita tentang seseorang, didasarkan pada bagian

²² Bimo Wargito, *Psikologi sosial sebagai pengetahuan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1991, hal. 94.

²³ Saparinah Sadli, *Persepsi SoSial Mengenai Peerilaku Menyimpang*, LP3S, Jakarta, 1986 hal. 72

²⁴ Mifta Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, CV Rajawali, Jakarta, 1983, hal.

mana seseorang (menurut pengetahuan kita tentang mereka) menjadi pengharapan kita tentang dia.

Pengharapan dan evaluasi, adalah merupakan dua unsur yang saling berkaitan. Seseorang mempunyai pengharapan akan orang lain atau kelompok lain karena ia mengetahui orang atau kelompok tersebut. Dan seseorang bisa memberikan penilaian tentang orang lain atau kelompok tersebut karena ia tahu dan mempunyai pengharapan terhadap orang atau kelompok tersebut.

Proses pemahaman melalui penglihatan, pendengaran, perasaan, sangat dipengaruhi oleh tiga variabel yaitu : obyek atau peristiwa yang dipahami, lingkungan terjadinya persepsi, dan orang-orang yang melakukan terjadinya persepsi.

Sub proses dalam persepsi ada tiga macam, yang menunjukkan sifat persepsi merupakan hal yang kompleks dan intersktif. Sub proses yang pertama adalah stimulus atau situasi atau obyek yang hadir. Selanjutnya adalah registrasi, interpretasi dalam masa registrasi, seseorang menerima informasi melalui penginderaan. Orang tersebut akan menerima semua informasi yang terdengar atau terlihat padanya lalu timbul interpretasi tergantung bagaimana seseorang melalui pendalaman, motivasi, dan kepribadian orang yang mempunyai persepsi. Sub proses yang terakhir yaitu umpan balik yang merupakan reaksi dari obyek persepsi.²⁵

²⁵ Ibid. hal. 53

Persepsi merupakan cara seseorang menyerap dan mengorganisasikan informasi *dalam* lingkungan sekeliling. Persepsi merupakan proses pribadi, dimana pandangan seseorang terhadap sesuatu objek mungkin saja berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini disebabkan persepsi seseorang dipengaruhi atau ditentukan oleh berbagai faktor, yang oleh Indra Wijaya disebutkan antara lain ²⁶:

- a) Faktor lingkungan.
- b) Faktor konsepsi.
- c) Faktor yang berhubungan dengan konsep seseorang tentang dirinya sendiri.
- d) Faktor yang berhubungan dengan motif dan tujuan.
- e) Faktor pengalaman masa lampau.
- f) Faktor pengetahuan.

Persepsi merupakan *salah* satu faktor dalam diri seseorang yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan untuk berperilaku tertentu. Oleh karenanya persepsi ini sangat bersifat subjektif dan merupakan hasil penilaian terhadap suatu objek.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan proses mental individu di dalam memberikan pandangannya terhadap suatu hal atau obyek. Sehingga menghasilkan sikap tertentu dalam diri individu yang bersangkutan. Kaena sikap individu-individu yang berbeda akan melihat hal yang sama dengan cara-cara yang berbeda. Dengan kata lain persepsi merupakan bentuk pola pikir seseorang dalam memahami suatu fenomena atau

²⁶ Adam Ibrahim I.W, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru, Jakarta, 1986, hal.24.

obyek tertentu secara subyektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang adalah psikologis, keluarga, kebudayaan.

C. 3. Mahasiswa dan keterlibatan politik

Dalam kaitannya dengan merealisasikan kehidupan politik yang semakin demokratis, tentu membutuhkan peran serta seluruh komponen masyarakat, terutama para generasi muda yang terdidik, termasuk mahasiswa. Mereka sering dijuluki sebagai *agent of modernization* dan kadang dinamai *agent of development*.

Predikat semacam itu tentu merupakan harapan bagi banyak orang terhadap para mahasiswa. Namun, hal itu juga bisa dimaknai dengan tanggung jawab yang harus dipikul oleh mahasiswa sebagai tugas normatif dari ekspektasi masyarakat. Pada masa pra dan paska kemerdekaan, peran kaum muda terdidik dalam bidang politik sangat signifikan.

Mahasiswa menurut Lewis Coser²⁷ adalah orang-orang yang kelihatannya tidak puas menerima *kenyataan* sebagaimana adanya. Mereka mempertanyakan kebenaran yang berlaku pada suatu saat, dalam hubungannya dengan kebenaran yang lebih tinggi dan lebih luas.

Sedangkan menurut Edward Shils²⁸ mengemukakan bahwa mahasiswa dalam pandangannya sebagai kaum cendekiawan yang mencari kebenaran.

²⁷ Sulistiati Ismail Gani, *Pengantar Ilmu Politik*, PT. Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 113.

²⁸ Alvian Darmawan, *Mahasiswa dan Masa Depan Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995, hlm.107.

Alfian Darmawan memberikan perspektif yang berbaur normatif dan praktis terhadap mahasiswa dengan statement :

“mahasiswa tidak boleh di warnai oleh adanya ‘*vested interest*’. Oleh karena itu setiap tindakan atau gerakan yang dilakukan adalah harus berdasar komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Sebab adalah suatu tindakan yang absurd (atau bahkan keliru) jikalau orang menginginkan keterpuasan dan keterasingan mahasiswa dengan masyarakat.”²⁹

“selain itu, sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya era globalisasi dunia, dan semakin derasnya dorongan untuk terciptanya iklim keterbukaan, maka keinginan kuat dari kalangan mahasiswa sebagai bagian dari suatu masyarakat akademis untuk mempercepat terwujudnya keterbukaan dan juga iklim yang lebih demokratis, seringkali menjadi salah satu sumber ketegangan antara dunia akademis dan para politisi pemegang kekuasaan.”³⁰

Membaca pikiran para ahli di atas, tampak sekali atmosfer nilai-nilai normative yang kadang kerap dikritik sebagai sesuatu yang tidak antroposentris atau membumi. Argument yang menjadi landasan adalah bahwa tidak dapat dipisahkan antara kehidupan mahasiswa sebagai makhluk sosial dengan dunia sosial termasuk di dalamnya adalah sebagai anggota partai atau organisasi tertentu. Dalam hal ini saja mahasiswa tidak dapat melepaskan diri dari berbagai unsure kepentingan seperti yang dipesankan oleh Alfian Darmawan di atas.

Sedangkan sebutan mahasiswa sebagai sosok yang mencari kebenaran adalah sesuatu yang relatif untuk dilihat dalam perspektif yang multikultural seperti

²⁹ Ibid. hal. 108

³⁰ Ibid. hal. 109

dalam konteks ke Indonesiaan. Karena itu ciri-ciri diatas lebih bersifat normatif dan berbau pesan moral ketimbang sesuatu yang mudah dilihat dan diketahui secara lahiriah. Jika demikian, definisi mahasiswa menjadi kabur. Sebab tidak disebut mahasiswa jika tidak mencari kebenaran.

Keterlibatan politik tergantung dari persoalan-persoalan, para pemimpin, gagasan-gagasan, lembaga-lembaga atau peristiwa-peristiwa politik. Suatu keterlibatan sikap yang bersifat kejiwaan boleh jadi bisa dan tidak dapat dicerminkan dalam tindakan-tindakan politik yang nyata walaupun sikap lebih abadi dari *keadaan* fikiran ataupun suasana hati yang fana, namun sikap cenderung berubah dengan berlalunya waktu dan dengan berubahnya keadaan, dan cenderung dipengaruhi motif. Keterlibatan sikap membentuk cara rakyat merasakan dan menanggapi gejala politik.

Tujuan dari keterlibatan politik yang dilakukan oleh mahasiswa adalah untuk *mempengaruhi* baik dalam artian memperkuatnya, maupun dalam artian menekannya, sehingga memperhatikan atau memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Secara umum keterlibatan politik adalah masalah pokok ilmu politik, bahkan lembaga-lembaga politik secara sederhana merupakan tingkah laku yang sudah terpola.

D. Definisi Konseptional

Ilmu sosial banyak sekali menggunakan abstraksi-abstraksi yang dibuat secara umum yang dinamakan *konsep*. Konsep menggambarkan suatu fenomena secara abstrak yang dibentuk dengan jalan membuat generalisasi terhadap sesuatu yang khas³¹. Jadi definisi konseptional merupakan definisi yang menggambarkan suatu abstraksi dari hal-hal yang perlu diamati. Adapun definisi konseptional yang digunakan adalah :

- a. Persepsi merupakan proses yang terjadi dalam diri pribadi manusia dalam memahami informasi atau menafsirkan dalam memberikan penilaian terhadap suatu objek berdasarkan faktor pengalaman, pengetahuan, konsepsi, motivasi dan faktor lingkungan.
- b. Persepsi terhadap partai politik adalah proses dimana seseorang menafsirkan atau memahami berdasarkan pengalaman, pengetahuan, konsepsi, motivasi dan lingkungan tentang partai politik.
- c. Mahasiswa adalah individu-individu yang sedang melaksanakan pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi, seperti universitas, sekolah tinggi, institusi, akademi dan lainnya yang sederajat.
- d. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Kelompok ini bertujuan untuk mendapatkan kekuatan politik dan merebut kedudukan dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan mereka didalam sistem politik yang berlaku.

³¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 148.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut³².

Adapun variabel-variabel yang perlu dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap fungsi partai politik
2. Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap visi, misi dan tujuan partai politik
3. Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa antara keterkaitan Amien Rais dan PAN
4. Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap PAN pasca Amien Rais
5. Pengetahuan dan pemahaman mahasiswa terhadap PAN, PMB (Partai Matahari Bangsa), dan Muhammadiyah.

F. Metode Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa terhadap PAN pasca Amien Rais.

³² Ibid, hlm. 152

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi di bidang ilmu sosial dan ilmu politik, khususnya mengenai partai politik.

b) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa tentang pemahaman terhadap partai politik.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Winarno Surahmat adalah penelitian yang bertujuan menurunkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau tentang proses yang sedang berlangsung, kecenderungan yang nampak dan pertentangan yang memancing atau kelainan yang muncul.

4. Unit Analisa

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

5. Jenis Data

- a) Data primer adalah data yang secara langsung berasal dari responden, dalam hal ini melalui penyebaran kuesioner kepada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b) Data sekunder adalah data yang data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, media massa, makalah, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a) Teknik Kuesioner

Kuesioner adalah teknik mengumpulkan data dengan menyerahkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden³³.

- b) Teknik dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan seperti halnya penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku, surat kabar serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

7. Teknik Sampling

Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cluster Random Sampling. Sampel jenis ini dikumpulkan dengan jalan membagi-bagi populasi atas kelas-kelas atau tingkat-tingkat tertentu. Kemudian ditentukan

³³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm.64.

para anggota sampel dari setiap kelas, sehingga setiap kelas itu diwakili dalam sampel³⁴.

Responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden mahasiswa UMY. Dalam penentuan ukuran sampel adalah kelipatan (sepuluh kali atau lebih) jumlah variabel.

Berdasarkan data jumlah mahasiswa aktif UMY tahun 2007 maka dapat dilakukan penarikan sampel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Distribusi Responden

Fakultas	Mahasiswa	Sampel
Ekonomi	1.815	$1.815 \times 100 : 7.925 = 23$
Isipol	2.903	$2.903 \times 100 : 7.925 = 37$
Hukum	749	$749 \times 100 : 7.925 = 9$
Agama Islam	406	$406 \times 100 : 7.925 = 5$
Teknik	265	$265 \times 100 : 7.925 = 3$
Kedokteran	1.561	$1.561 \times 100 : 7.925 = 20$
Pertanian	226	$226 \times 100 : 7.925 = 3$
Jumlah	7.925	100

Setelah melakukan pra penelitian diketahui jumlah populasi atau mahasiswa aktif UMY tahun 2007 adalah sebanyak 7.925 orang. Kemudian dalam penarikan sampel dilakukan penggolongan menurut kelas, dalam hal ini fakultas, maka dapat diketahui proporsi sampel yaitu Fakultas Ekonomi sebanyak 23 responden, Isipol 37

³⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 144

responden, Hukum 9 responden, Agama Islam 5 responden, Teknik 3 responden, Kedokteran 20 responden, dan Pertanian 3 responden. Jadi jumlah semua responden adalah sebanyak 100 orang.

8. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu ³⁵:

a) Reduksi data

Merupakan proses seleksi, pengukuran, dan abstraksi data kasar yang dilaksanakan selama berlangsungnya penelitian.

b) Sajian data

Merupakan rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan untuk dilakukan. Dengan melihat sesuatu penyajian data, peneliti akan mengerti tentang apa yang terjadi serta memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa ataupun tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut.

c) Penarikan kesimpulan

Dari sajian data yang telah tersusun selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan akhir.

Setelah diambil kesimpulan dalam tiap-tiap butir pertanyaan, maka untuk mengetahui rata-rata dari kesimpulan tersebut digunakan skala indeks.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm.12

Rumus mencari indeks :

$$I = \frac{1F_1 + 2F_2 + 3F_3 + 4F_4}{N}$$

I = Indeks

F = Frekuensi

N = Jumlah sampel

Sedangkan perhitungan interval dari nilai indeks adalah sebagai berikut :

$$Interval = \frac{NilaiTertinggi - NilaiTerendah}{BanyaknyaKriteria}$$

$$Interval = \frac{4-1}{3} = 1$$

Dengan kategori :

3,01 – 4 = termasuk kategori tinggi

2,01 – 3 = termasuk kategori sedang

1 – 2 = termasuk kategori rendah